



## **PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. BUSTAMI. HY, SH, MM  
NIP : 19640907 198603 1 003  
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AMRIL MUKMININ  
Jabatan : BUPATI BENGKALIS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Juli 2019

**Pihak Kedua**

**BUPATI BENGKALIS**

**AMRIL MUKMININ**

**Pihak Pertama**

**SEKRETARIS DAERAH**

**H. BUSTAMI. HY, SH, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19640907 198603 1 003**

**PERUBAHAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	74,75
		2. Persentase OPD dengan IKM minimal 70	90%
		3. Persentase tindaklanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi (RB)	4. Indek Reformasi Birokrasi (RB)	70
		5. Persentase SOPD dengan hasil evaluasi organisasi tepat fungsi dan ukuran	85%
3.	Meningkatnya Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	6. Persentase peningkatan kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	20%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kabupaten Bengkalis	7. Predikat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	BB
5.	Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda)	8. Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang lulus uji harmonisasi	70%

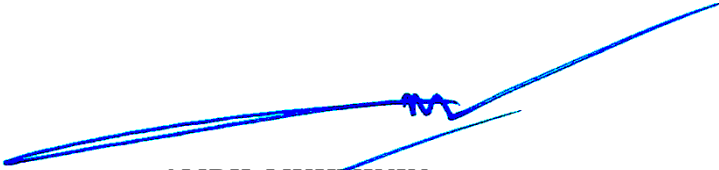
No	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 32.235.417.133,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 28.783.235.667,00
3.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 1.608.619.078,00
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 958.986.039,00
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 18.476.780.501,00
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 9.243.631.532,00
7.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.351.066.100,00
8.	Program Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Rp. 5.000.000.000,00
9.	Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan	Rp. 11.334.900.000,00

No	Program	Anggaran
10.	Program Pembinaan Ketatalaksanaan Pendayagunaan Aparatur dan Pelayanan Publik	Rp. 1.984.539.900,00
11.	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Rp. 1.289.800.000,00

Bengkalis, Juli 2019

**Pihak Kedua**

**BUPATI BENGKALIS**



**AMRIL MUKMININ**

**Pihak Pertama**

**SEKRETARIS DAERAH**



**H. BUSTAMI. HY, SH, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19640907 198603 1 003**